

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12
Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185
PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ini disusun dengan memperhatikan target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD dalam rangka mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum, Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial..

Demikian Rencana Strategis ini ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Desember 2016

KEPALA DINAS,



Dr. GUNTUR TALAJan, SH. M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19641119 198903 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	LatarBelakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kalimantan Tengah	6
2.2.	Sumber Daya Dinas Sosial Kalimantan Tengah	10
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kalimantan Tengah	17
3.2.	Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3.	Penentuan Isu–Isu Strategis	22
BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
4.1.	Visi dan Misi Dinas Sosial Kalimantan Tengah	23
4.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kalimantan Tengah	27
4.3.	Strategi dan Kebijakan	35
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Program Prioritas	40
5.2	Indikator Kerja	42
5.3	Kelompok Sasaran	46
5.4	Pendanaan Indikatif	46

BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
6.1.	Indikator Kinerja	51
BAB VII	PENUTUP	53

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Menteri Dalam Nendegri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 tentang penyusunan Rencana Strategis SKPD yang mengamanatkan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan yang terjadi baik skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara sosial ekonomi dan sosial budaya turut berperan penting dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih lanjut dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sehingga negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Manajemen yang berorientasi pada hasil, diperlukan perencanaan strategis, oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021, meskipun di dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dan perkembangan permasalahan sosial yang kian kompleks.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, hambatan, dan perubahan permasalahan sosial yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi fakir miskin, meningkatnya jumlah anak terlantar karena kondisi ekonomi dan kerentanan keluarga, permasalahan lanjut usia yang cenderung meningkat akibat kemiskinan, terbatasnya akses pelayanan bagi penyandang disabilitas, Keterpencilan dan keterisolasian sebagian masyarakat di pedalaman sehingga terbatasnya akses pelayanan, Meningkatnya korban penyalahgunaan NAPZA, Munculnya tuna sosial (gepeng dan pengemis), maraknya terjadinya tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak serta berbagai permasalahan sosial lainnya yang memerlukan penanganan dan perhatian dari pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 berdasarkan pada peraturan, perundangan antara lain:

1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 dan 34.
2. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
 5. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 6. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Peraturan Daerah No..... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021.
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai dasar bagi semua stakholder dan seluruh aparaturnya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Mengevaluasi kinerja dimasa lalu yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi sehingga menjadi isu strategis, sasaran strategis dan upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;

- b. Sebagai penjabaran dari Rerencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Tengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- c. Sebagai instrumen pemantauan, pengendalian dan evaluasi capaian pelaksanaan program / kegiatan;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Tahun 2016–2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; berisi Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Isu-Isu Strategis; berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan; berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif; berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD; berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut diatas Tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi bidang sosial skala provinsi, sedangkan fungsi Dinas Sosial Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang undangan yang ditetapkan Gubernur;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial;
3. Identifikasi dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial;
5. Penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial;
6. Pelayanan sosial pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Pengawasan terhadap Pengasuhan anak, Pengangkatan anak, penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan sumbangan sosial.
8. Perlindungan sosial terhadap anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat;

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

5) Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
- c. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

6) Bidang Penanganan Fakir Miskin,

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
- c. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

UPTD; terdiri dari 3 (tiga) panti yaitu:

1. Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW)

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

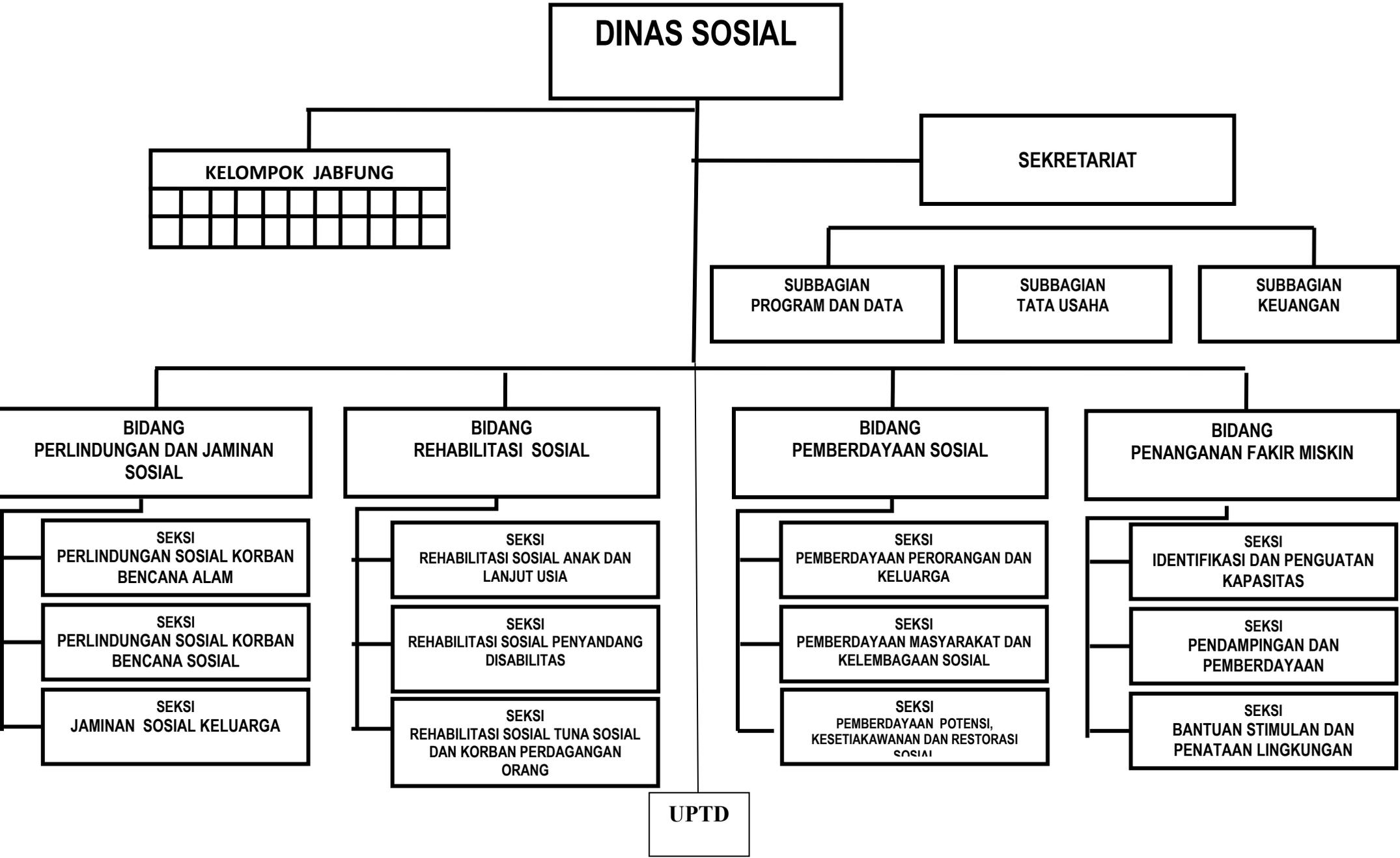
2. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) “Sinta Rangkang”

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan
- d. Jabatan Fungsional

3. Panti Sosial Bina Laras (PSBL)

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bagian Program
- d. Seksi Pelayanan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber Daya SKPD

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 129 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 122 orang dan pegawai tidak tetap / tenaga kontrak 7 orang, untuk melihat kompetensi yang dimiliki, diklasifikasikan kedalam jenjang pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar	3 orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2 orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	41 orang	
4	Diploma Satu (D-1)	-	
5	Diploma Tiga (D-3)	9 orang	
6	Diploma Empat (D-4)	14 orang	
7	Sarjana (S-1)	38 orang	
8	Sarjana (S-2)	13 orang	
9	Sarjana (S-3)	2 orang	*)
	Jumlah	122 orang	

Keterangan: *) Pegawai diperbantukan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Dari jumlah pegawai sebanyak 122 orang, berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	1	0	1	
2	I/d Juru Muda	1	0	1	
3	II/a Pengatur Muda	1	3	4	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I	9	6	15	
5	II/c Pengatur	3	0	3	
6	II/d Pengatur Tk. I	0	0	0	
7	III/a Penata Muda	9	7	16	
8	III/b Penata Muda Tk.I	20	17	37	
9	III/c Penata	7	6	13	
10	III/d Penata Tk. I	9	5	14	
11	IV/a Pembina	9	4	13	
12	IV/b Pembina Tk. I	1	3	4	
13	IV/c Pembina Utama Muda	0	0	0	
14	IV/d Pembina Utama Madya	1	0	1	
	IV/e Pembina Utama	0	0	0	
	Jumlah	70	52	122	

Keterangan: *)

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	3	6
3	Eselon IV	14	3	17
4	Fungsional khusus (Pekerja Sosial)	7	14	21
5	Fungsional Umum	3	1	4
	Jumlah	28	21	49

2) Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	131	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	707	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	980	Orang
4	Penyuluh Sosial Masyarakat	60	Orang
	Jumlah		

b. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana tabel 2.5

Tabel 2.5
Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Nama Kelembagaan	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial	52	LKS
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	13	Lembaga
3	Karang Taruna	563	KT
4	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	1	Lembaga
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	30	Lembaga
6.	Organisasi Sosial	125	Orsos
	Jumlah		

3) Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelayanan sosial bagi penyanadang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial provinsi Kalimantan Tengah memiliki sarana dan prasarana pelayanan sosial, adapun jenis sarana dan prasarana sosial dapat dilihat dalam tabel 2.6

Tabel 2.6
Sasaran dan prasarana pelayanan sosial

No	Jenis Sapra	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Dinas	1 Buah	
2	Panti Sosial Lanjut Usia	1 Buah	Daya tampung 100 orang
3	Panti Sosial Karya Wanita	1 Buah	Daya tampung 100 orang
4	Panti Sosial Bina Remaja	1 Buah	Daya tampung 110 orang
5	Trauma Center	1 Buah	Daya tampung 10 orang
6	Gudang Bencana	1 Buah	
7	PSBL	1 Buah	Daya tampung 100 orang

1. Sumber Dana /Penganggaran

Sumber dana atau penganggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan bidang sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi APBD Belanja Langsung Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	5.668.365.000	5.538.360.000	97,69
2012	9.066.500.000	8.618.328.984	95,06
2013	15.807.010.000	15.267.551.726	96,59
2014	12.750.000.000	12.442.206.483	97,59
2015	14.420.000.000	13.943.649.275	97,17
Total	57.711.875.000	55.810.096.468	96,70

Data realisasi pada akhir bulan Desember

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada dua sasaran strategis yaitu peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, capaian kinerja yang telah dihasilkan dilihat melalui pelaksanaan Renstra 2011 -2015. Berikut ini adalah tabel dan diagram yang menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2011-2015

REALISASI KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2011 S/D 2015

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA	2011			2012			2013			2014			2015		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA					-			-			-			-		
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	25 lokasi	5	5	100	5	5	100	5	2	40	5	3	60	5	3	60
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin								12			15			20		
Pemetakan/ Penjajagan Awal Calon Lokasi KAT	10 lokasi	2	2	100	2	1	50	2	4	200	2	3	150	2	4	200
Pembangunan Rumah Warga KAT								45			45			50		
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL																
Pelaksanaan Kie Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	10 kali	1		50	2		100	2		100	2		100	2		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bimbingan Sosial Dan Ketrampilan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	600 orang	120	120	100	120	120	100	120	120	100	120	120	100	120	120	100
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga											99			70		
Pendataan Anak Terlantar Dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	10 paket	2	5	250	2	6	300	2	13	650	2	0	0	2	0	0
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR																
Pengembangan Bakat Dan Ketrampilan Anak Terlantar	25 lokasi	2	0	0	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	1	20
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA																
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	200 orang	40	50	125	40	50	125	40	50	125	40	23	57,5	40	60	150
Pendataan Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	5 lokasi	1	3	300	1	8	800	1	8	800	1	0	0	1	0	0
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO																
Pelayanan Sosial Bagi Penghuni Asuhan /Panti Jompo	500 Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT LAINNYA)																
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	325 orang	60	100	166,67	60	90	150,00	60	65	108,33	60	100	166,67	85	100	117,65

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	33 orang	0	0	0	33	33	100	33	33	100	33	33	100	33	35	106,06
Pemberdayaan Organisasi Sosial	10 orsos	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	3	150	2	2	100
Pemberdayaan Karang Taruna	250 KT	50	50	100	50	70	140,00	50	50	100	34	50	147,06	50	50	100
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan & KSN	3470 orang	694	628	90,49	694	526	75,79	694	140	20,17	694	60	8,65	694	60	8,65
Fasilitasi Komda Lansia	1 paket	1 paket	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM																
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	14 kab/kota	14 kab/kota			14 kab/kota						0					
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL																
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	14 kab/kota	14 kab/ kota			14 kab/kota						0					
PROGRAM PKH																
Peningkatan Dan Akses Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Masyarakat	14 kab/kota	2 kab /kota			2 kab/kota			2 kab/kota			13			13		
PROGRAM PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL																
Pengumpulan Dan Pengelolaan Sumber Dana	25 kegiatan	0	0	0	5	5	100	5	5	100	5	5	100	5	5	100

Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan Sosial maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kalimantan Tengah antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Rendahnya kemampuan Keluarga Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan dasar yang dianggap prioritas adalah kebutuhan ekonomi, keterampilan kerja dan kemampuan mengakses sumber daya yang ada di lingkungan mereka.

2. Rendahnya kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan teraksi sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan hal diatas adalah :

- a. Kondisi alam yang masuk dalam kategori terpencil;
- b. Rendahnya penghasilan masyarakat.;
- c. Terbatasnya lapangan kerja dan keterampilan kerja yang dimiliki;
- d. Kurangnya motivasi dalam mengembangkan diri;
- e. Tidak adanya modal usaha;

- f. Rendahnya kemampuan berinteraksi sosial:
- g. Rendahnya akses terhadap sumber-sumber pelayanan.
- h. Ketidakmampuan secara fisik untuk berkarya

3. Kurangnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial

Pelayanan Kesejahteraan Sosial bukan hanya kewajiban pemerintah melainkan juga kewajiban masyarakat dan dunia usaha. Salah satu manfaat keterlibatan masyarakat dan dunia usaha adalah perluasan jangkauan pelayanan. Selama ini keterlibatan masyarakat dan dunia usaha masih belum maksimal. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial;
- b. Lembaga-lembaga sosial yang ada belum berorientasi kepada pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Pengelolaan LKS masih bersifat tradisional;
- d. Akses pengembangan LKS melalui pemanfaatan Sistem Sumber yang tersedia masih terbatas.
- e. Tidak adanya regenerasi kepengurusan yang bersifat terbuka dan berorientasi terhadap perbaikan pelayanan.

4. Kurangnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan.

Terdapat kelompok di masyarakat yang sangat rentan terhadap tindakan-tindakan yang bersifat eksploitasi dan kekerasan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang bersifat kongkrit dan berkelanjutan agar hal tersebut tidak terus berkembang dan menimbulkan masalah sosial yang baru. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya masalah diatas diantaranya :

- a. Keterbatasan dari faktor ekonomi.
- b. Ketidakharmonisan dalam keluarga.
- c. Perlakuan yang salah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak.
- d. Adanya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- e. Ketidakpedulian keluarga terhadap keberadaan anggota keluarga.

5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Perilaku masyarakat khususnya generasi muda dalam pembangunan tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang berorientasi kepada kemajuan negara dalam aspek kehidupan, baik sosial maupun aspek budayanya. Mereka lebih cenderung berperilaku dengan mengadopsi budaya luar dibandingkan dengan budaya yang di miliki bangsa indonesia.

Salah satu permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah :

Disebabkan antara lain :

- a. Tumbuhnya perilaku individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain dan lingkungan sekitarnya.
- b. Hilangnya Figur Tokoh Teladan yang menjadi panutan dalam berperilaku.
- c. Proses globalisasi yang begitu cepat dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan
- d. Kemajuan teknologi informasi yang sangat mudah diakses dan tidak dibatasi oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia.
- e. Rendahnya kepedulian tokoh-tokoh di masyarakat tentang perubahan perilaku suatu komunitas
- f. Rendahnya peran keluarga dalam memenuhi nilai etika moral di lingkungan keluarga

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

- g. Visi dan misi Gubernur secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kalimantan Tengah secara adil dan bermartabat. Walaupun di dalam penjabaran misi tidak terdapat misi khusus tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, namun semua yang tertuang di dalam misi dan kegiatannya secara tersirat merupakan kegiatan yang akan mengarah dan mendukung upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.
- h. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

- i. Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2020 disusun berdasarkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di dalam Renstra dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah diuraikan berdasarkan 4 fungsi pokoknya yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ini juga berusaha mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2020 disesuaikan dengan kondisi masyarakat, spesifikasi permasalahan dan kemampuan keuangan daerah.
- j. Secara umum Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah belum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, namun isi dari Renstra dimaksud sudah mengarah pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terstruktur. Kepada para pemangku kepentingan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota sudah disampaikan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2015-2020, agar menjadi acuan bagi perbaikan dan atau penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah:

**Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat
Menuju Kalteng Berkah
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- Misi Pertama** : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
yaitu Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten
- Misi Kedua** : Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya konektivitas antar daerah
- Misi Ketiga** : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir & Pantai
Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan nelayan
- Misi Keempat** : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat serta
Meningkatnya daya beli masyarakat
Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dengan sasaran
Meningkatnya sektor ekonomi hijau serta Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat
- Misi Kelima** : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Profesional, Adil Dan Anti Korupsi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan
- Misi Keenam** : Pendidikan, Kesehatan & Sosial Budaya
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran
Meningkatnya kualitas pendidikan,
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat , Meningkatkan peran Sektor Pariwisata dengan sasaran Terpasarkannya destinasi wisata
- Misi Ketujuh** : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran Menurunnya Kualitas lingkungan hidup
- Misi Kedelapan** : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran Meningkatkan pendapatan asli daerah

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis

1. Perubahan orientasi pelayanan sosial yang awalnya dari non panti menjadi berbasis panti sehingga diperlukan penataan organisasi panti agar lebih profesional baik dari sisi SDM maupun Manajemen Pelayanan. Sementara kondisi saat ini, pengelolaan panti masih belum mempunyai standar pelayanan panti dan belum ada akreditasi.
2. Terbatasnya panti yang dimiliki pemerintah, khususnya untuk panti-panti rehabilitasi seperti penyandang cacat, narkoba dan anak sehingga diperlukan kebijakan daerah yang lebih nyata tentang permasalahan ini.
3. Kontribusi anggaran yang belum seimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sehingga diperlukan kebijakan khusus yang mengarah kepada keseimbangan pendanaan sehingga program pusat mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah provinsi
4. Perbedaan nomenkelatur instansi sosial pada kabupaten kota yang menyebabkan pelayanan menjadi lebih sempit karena dukungan anggaran yang terbagi dengan sektor lain
5. Proses rotasi yang cukup cepat di kabupaten/kota sehingga keberlanjutan program menjadi terganggu karena proses tersebut tidak disertai dengan regenerasi yang matang dalam perpindahan kekuasaan dalam organisasi

Bab 4

VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana Dinas Sosial harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2008 maka Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Sosial selama 2016-2021 adalah mengikuti visi dan misi Gubernur yaitu pada misi keempat yang berbunyi:

**Menuju Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Sosial mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 khususnya pada misi ke Misi keempat yaitu : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan

Kemiskinan” maka Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Visi yang disepakati oleh seluruh staf Dinas Sosial dan *stakeholders* telah mengacu pada visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, visi dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- 1.** Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.
- 2.** Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 3.** Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS).
- 4.** Meningkatkan pemanfaatan modal sosial di masyarakat

Secara terperinci, penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dinas sosial sebagai bagian program dari kementerian sosial mempunyai tugas pokok dalam melakukan penanganan kemiskinan. Penanganan tersebut mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan pelayanan sosial berupa meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan peningkatan kualitas hidup;

2. Meningkatkan kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun tidak semua golongan masyarakat mampu mencapai kondisi sejahtera. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kelompok ini kemudian dikelompokkan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk membantu mereka mencapai kondisi sejahtera, diperlukan keterlibatan pihak lain yang secara terus menerus mendampingi mereka sampai mereka mempunyai kemampuan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat stimulan. Hal ini untuk menghilangkan ketergantungan mereka terhadap pihak lain.

Berdasarkan faktor penyebab, program yang diberikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi PMKS, disesuaikan dengan kondisi permasalahan sasaran yang kemudian dikelompokkan menjadi program yang bersifat pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan ditujukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai beberapa keterbatasan diantara kemampuan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga jangkauan pelayanan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut.

Salah satu pihak yang paling mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan adalah masyarakat sekitar sasaran, baik secara individu maupun lembaga-lembaga sosial yang terbentuk secara sukarela dan bertujuan memberi pelayanan sosial.

4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.

Keberadaan generasi muda dalam suatu negara, merupakan hal yang sangat strategis. Keberlangsungan suatu negara pada masa datang akan sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam mengelolanya. Negara akan terus berkembang dan maju, apabila generasi muda mempunyai kemampuan dan perilaku yang baik. Dan sebaliknya keberadaan negara akan bermasalah apabila generasi mudanya tidak mempunyai kepedulian yang tinggi dan tidak mampu menghormati apa yang telah diraih oleh para pendahulunya.

Globalisasi yang terjadi, sangat berpengaruh terhadap perilaku generasi muda saat ini. Banyak terjadi pergeseran yang mengarah kepada perilaku negatif. Hal-hal yang dulu dianggap tabu, kini secara perlahan telah berubah. Keberadaban yang dimiliki bangsa Indonesia, perlahan menjadi hilang di ganti dengan budaya-budaya baru yang diadopsi dari negara lain.

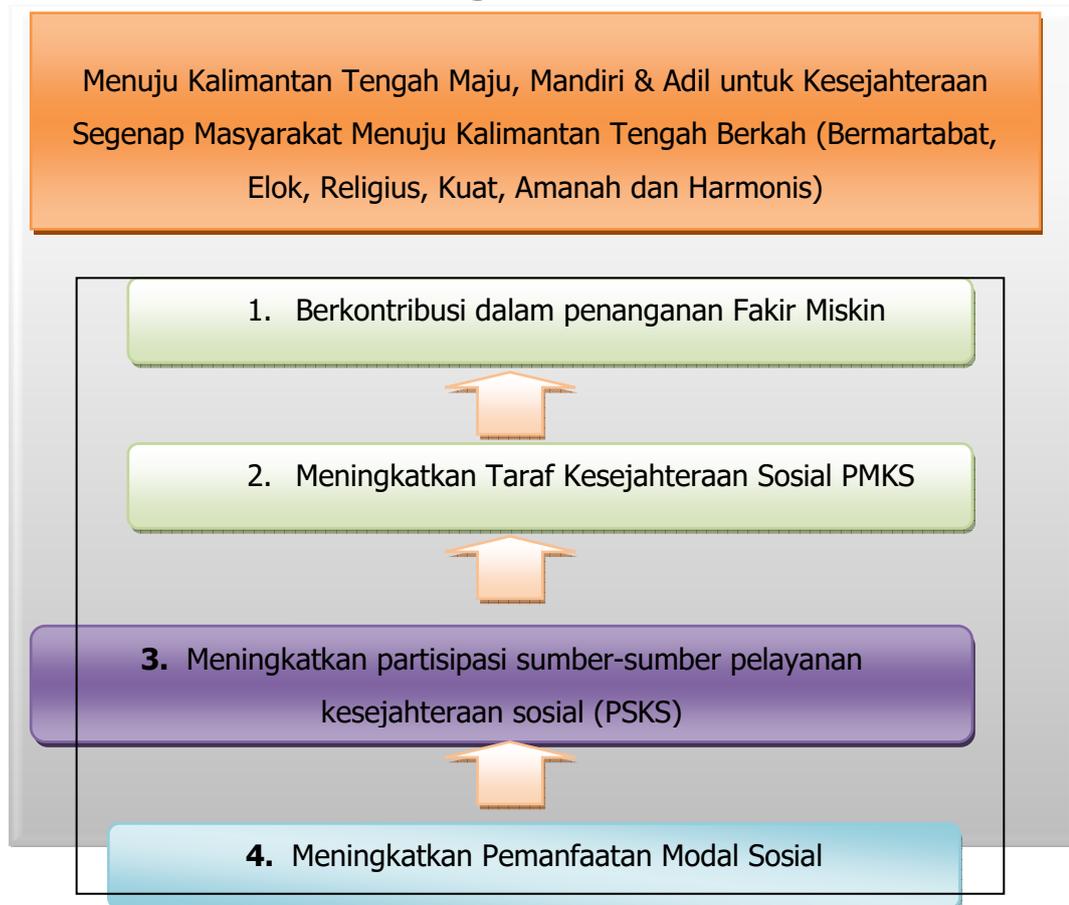
Kondisi-kondisi diatas, apabila tidak ditangani secara dini akan menyebabkan hilangnya jatidiri bangsa Indonesia yang sangat luhur. Kepedulian sosial akan luntur. Generasi muda tidak lagi merasa sebagai bagian dari pemegang amanah yang harus siap dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan negaranya. Mereka menjadi generasi apatis yang tidak peduli kepada lingkungan sekitar dan bersifat individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri di banding dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, pemerintah harus memfasilitasi harapan dan meneruskan cita-cita pahlawan dalam memelihara budaya yang dimiliki bangsa indonesia. Salah satu upaya adalah mengingatkan generasi muda

tentang cita-cita pahlawan melalui kegiatan yang bersifat edukasi dan membangun kekuatan kebangsaan, melibatkan dalam kegiatan sosial, dan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kesetiakawanan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memotivasi secara lebih efektif terhadap penghargaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Dari keempat misi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Hubungan Visi dan Misi



4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Sosial. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas

Sosial selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin dengan tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - Meningkatkan peranan dan fungsi sosial dimasyarakat.
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS
 - Meningkatkan kemampuan aksesibilitas bagi PMKS
 - Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS
3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pengembangan, perluasan dan penguatan jaringan kerja ;
 - Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosia dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial masyarakat.
 - Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan mental dan sosial pada masa mendatang (revolusi mental).

- Meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat (restorasi kesetiakawanan sosial).
- Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan kepada generasi muda.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.
 - Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri
 - Meningkatnya peranan dan fungsi sosial dimasyarakat secara wajar;
 - Berkoortribusi dalam penurunan angka kemiskinan

2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengakses sumber pelayanan yang tersedia dalam upaya menumbuhkan kemandirian sosial.
 - Meningkatnya pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS kategori rentan dalam pemenuhan hak dasar.

3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Sasarannya adalah sebagai berikut :
 - Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;

- Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - Meningkatnya pemahaman generasi muda akan pentingnya memelihara nilai-nilai pahlawan sebagai acuan pembangunan mental generasi muda pada masa mendatang
 - Meningkatnya kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui restorasi kesetiakawanan sosial.

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Realisasi Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13..15	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Org)	470	120	200	250	250	250	250
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi fakir miskin	Jumlah fakir miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya (orang)	600	120	200	250	250	250	250
	Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi fakir miskin	Jumlah Fakir miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	600	120	200	250	250	250	250
1.13..16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	879	260	270	300	300	300	300
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja.	Jumlah Anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (orang)	779	120	120	120	120	120	120
	Kegiatan Pelayanan sosial lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werda.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan hak dasar secara inklusifitas (orang)	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa di Panti Sosial Bina Laras	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang terpenuhi kebutuhan hak dasarnya secara inklusifitas (orang).	10	10	20	30	50	50	50
	Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Wanita Rawan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita	Jumlah Tuna Sosial dan wanita rawan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	100	30	30	50	50	50	50
1.13.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	150	30	30	30	30	30	30
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	30	30	30	30	30	30	30
	Kegiatan Perlindungan Sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang	100	20	20	20	20	20	20
1.13..18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Orang Dengan Kecacatan dan trauma yang dapat yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	450	160	160	160	160	160	160

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Realisasi Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuannya.(orang)	150	30	30	30	30	30	30
	Kegiatan Pemberian Alat Bantu bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar (orang)	150	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pemberian bantuan usaha ekonomis bagi orang dengan kecacatan	Jumlah Orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	150	30	30	30	30	30	30
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Lembaga Kesejahteraan Sosial swasta lainnya.	Jumlah Penghuni Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (org)	1250	250	250	250	250	250	250
	Kegiatan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi warga binaan di panti sosial /LKS swasta	Jumlah penghuni panti /LKS swasta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1250		100	200	200	250	250
	Kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana pelayanan sosial panti sosial/ LKS swasta	Jumlah panti sosial / LKS swasta yang memenuhi standar pelayanan panti (LKS)	0	0	5	5	5	5	5
1.13..20	Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnara pidana, PSK, dan penyakit sosiallainnya)	Jumlah Eks Penyakit Sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (org)	520	200	210	220	220	230	230
	Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial /penutupan lokalisasi	Jumlah penghuni lokalisasi yang mendapatkan sosialisasi rencana penutupan (orang)	120	120	100	100	100	50	50
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial		80	80	80	80	80	80	80
1.13.21	Program Pemberdayaan Perorangan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesos dan LKS yang memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan sosial (Org)	438	147	147	150	150	150	160
	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM manajer social kecamatan/ tenaga kesejahteraan social kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemampuan (orang)	35	35	35	35	35	35	35
	Kegiatan peningkatan Kualias SDM Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	150	30	30	30	30	30	30
	Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang ditingkatkan kualitas pelayanannya (LKS)	100	20	20	20	20	20	20
	Kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan Karang Taruna	Jumlah Kelembagaan Karang Taruna yang ditingkatkan kualitasnya.	100	20	20	20	20	20	20

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Realisasi Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan social	Jumlah generasi muda yang memiliki jiwa kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (orang).	500	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Komda Lansia provinsi	Jumlah Komda laansia provinsi		1	1	1	1	1	1
1.13. 37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial (Org)	725	739	800	800	800	800	850
	Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS Korban Bencana.	Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1200	100	300	300	300	300	300
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping yang mampu mengendalikan pelaksanaan program PKH (orang)	165	165	179	179	179	179	179
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah.	Jumlah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian yang mentaati ketentuan yang berlaku (lembaga)	50	10	10	10	10	10	10
	Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Jumlah PMKS yang mendapatkan pemulihan trauma (orang)	125	15	25	25	25	25	25
1.13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah	Prosesntase pemenuhan sarana/prasarana bagi pelaksanaan pelayanan sosial dalam panti	50%	70 %	72 %	74 %	75 %	75 %	75 %
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Bina Laras bagi orang dengan gangguan jiwa.	Jumlah gedung panti yang dibangun (unit)	0	0	3	3	3	1	
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Pengasuhan Anak	Jumlah gedung panti yang dibangun	0	0			3	3	1
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial lanjut Lanjut Usia/jompo	Jumlah gedung panti yang dibaangun (unit)	1	0	0	4	4	4	4
	Kegiatan Peningkatan kualitas gedung dan sarana panti Sosial	Jumlah gedung dan sarana panti yang direhabilitasi	58	3	5	5	5	5	5
	Kegiatan Pengadaan prasarana pelayanan Pantii Sosial	Jumlah prasarana pelayanan panti yang disediakan (Unit)	1	1	3	3	3	3	3

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu *S – O (Strengths – Opportunity)* yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Beberapa tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kalimantan Tengah adalah :

1. Hambatan

a. Belum tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat

Belum terlaksananya pendataan secara baik dan benar di setiap wilayah Kabupaten mengingat tidak adanya struktur dan lembaga yang khusus menangani bidang sosial di Kabupaten-Kabupaten, walaupun ada merupakan lembaga yang baru dan beraneka ragam menyebabkan tidak tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat sebagai dasar perencanaan penyusunan program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan PMKS, sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi.

c. Terbatasnya Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai pilar partisipasi sosial masyarakat yang menggalang gerakan kesejahteraan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- d. Terbatasnya jumlah panti sosial pemerintah sebagai sarana pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS.

2. Kekuatan

- a. Tersedianya SDM Bidang Sosial meskipun jumlahnya masih terbatas
- b. Sarana dan prasarana yang ada masih dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
- c. Tersedianya sumber-sumber penganggaran baik dari APBN maupun APBD.
- d. Tersedianya sumber dana sosial yang dapat dipergunakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial.
- e. Tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Tersedianya Tenaga Relawan Sosial yang berperan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Peraturan perundang-undangan yang ada telah mendukung dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Peluang.

- a. Kelembagaan bidang sosial sebagai urusan wajib dalam pembangunan, akan memperkuat peran Dinas Sosial baik di provinsi maupun kabupaten/kota
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dapat ditingkatkan perannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial
- c. Bidang kesejahteraan sosial memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan.
- d. Penataan pegawai sebagai ASN akan memperkuat terpenuhi pegawai di bidang sosial.

4. Tantangan

- e. Penyandang masalah kesejahteraan sosial selalu muncul di masyarakat seiring dengan lanjutnya pembangunan dan sistem informasi global yang berdampak sosial.
- f. Di era keterbukaan informasi publik, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, tepat dan berkeadilan

- g. Urusan bidang sosial sebagai urusan wajib yang menyelenggarakan pelayanan dasar bagi masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan secara profesional.
- h. Dengan adanya pembagian urusan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akan berdampak kepada penanganan PMKS, akibat ketidaksiapan kabupaten/kota untuk menerima penyerahan kewenangan.
- i. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh sosial masyarakat
- j. Semakin meningkatnya permasalahan sosial baik jenis maupun jumlahnya yang belum diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial.
- k. Kurangnya keterpaduan perencanaan program dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Propinsi dan Pusat sebagai proses botom up planing untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah.
- l. Kondisi geografis serta transportasi menyebabkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial belum dapat merata menjangkau seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil.
- m. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan tempat tinggal penduduk yang berjauhan menghambat relasi sosial masyarakat.
- n. Kurangnya pemahaman penyusun kebijakan di Kabupaten/Kota tentang pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu hal yang penting dibanding dengan bidang lain.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Visi: Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Upaya Bersama Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
Misi 1 :Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.			
	Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.	- Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri	Pemberian Pelatihan Keterampilan Kerja Pemberian Bantuan Stimulan Penguatan Kapasitas bagi Pendamping Fakir Miskin
		- Meningkatnya peranan dan fungsi sosial Fakir Miskin secara wajar;	
Misi 2: Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi dengan sasaran			
	- Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi dengan sasaran	Peningkatan Kapasitas SDM Pemberian Bantuan Sosial Pendampingan Sosial
	- Meningkatkan kemampuan aksesibilitas;		

Visi: Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Upaya Bersama Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
	- Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS		
Misi 3: Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja			
	- Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;	- Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;	Bimbingan dan Pelatihan Manajemen bagi Pengurus LKS
	-	-	Pemberian bantuan stimulan LKS
			Peningkatan kapasitas SDM relawan sosial
			Peningkatan peran dunia usaha dalam CSR
Misi 4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.			
	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	- Penyuluhan Sosial - Bimbingan Sosial - Aksi Sosial
	Meningkatnya penguatan nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial		

Bab 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penanganan tersebut mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan pelayanan sosial berupa meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan peningkatan kualitas hidup. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Bantuan Stimulan dalam bentuk Kelompok.
- 2) Bimtek Keterampilan Kerja
- 3) Penguatan Kapasitas bagi Pendamping Fakir Miskin

b. Program Pemberdayaan Sosial, kegiatannya meliputi :

Program ini diarahkan untuk mencegah, menekan, mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya melalui upaya penggalian potensi diri dan lingkungannya, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya lokal secara berkelanjutan, kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- 2) Pemberdayaan Keluarga Rentan

c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, kegiatannya meliputi :

Program ini diarahkan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu mandiri dalam kehidupan bermasyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan kegiatannya meliputi :

- 1) Pelayanan anak terlantar
- 2) Pelayanan lanjut usia terlantar
- 3) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
- 4) Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan perdagangan manusia
- 5) Rehabilitasi sosial Tuna Sosial

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan secara fisik, sosial maupun psikologis kepada anak, wanita maupun lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja migran yang terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga bermasalah sosial budaya, keluarga cerai miskin, serta keluarga dilingkungan sosial yang tidak menguntungkan dengan memprioritaskan kepada keluarga yang mempunyai masalah ganda, dengan kegiatan pokok antara lain:

- 1) Penanganan orang terlantar dan pekerja migran
- 2) Pemantauan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3) Pembinaan pengumpulan uang dan barang (PUB) dan undian gratis berhadiah (UGB)
- 4) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang bantuan sosial berbasis masyarakat
- 5) Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial
- 6) Pemulihan psikososial Korban Bencana Alam dan Sosial

e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini diarahkan pada upaya penggalian pendayagunaan, dan pengembangan potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial, yang berasal dari kalangan masyarakat, dengan kegiatan pokok antara lain :

- 1) Pembinaan organisasi sosial
- 2) Pengembangan kerjasama dunia usaha peduli sosial
- 3) Pembinaan karang taruna
- 4) Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- 5) Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- 6) Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Modal Sosial

Program ini diarahkan untuk menggali modal sosial di masyarakat sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara mandiri.

- 1) Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan sosial.
- 2) Penyuluhan Sosial Masyarakat.

5.2. Indikator Kerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2. Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Akhir Pencapaian

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Akhir Periode (2021)
2	3	11
Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Org)	1320
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	1.690
Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja.	Jumlah Anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (orang)	720
Kegiatan Pelayanan sosial lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werda.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan hak dasar secara inklusifitas (orang)	600

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Akhir Periode (2021)
2	3	11
Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa di Panti Sosial Bina Laras	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang terpenuhi kebutuhan hak dasarnya secara inklusifitas (orang).	210
Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Wanita Rawan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita	Jumlah Tuna Sosial dan wanita rawan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	160
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	180
Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	180
Kegiatan Perlindungan Sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang	120
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Orang Dengan Kecacatan dan trauma yang dapat yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	960
Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuannya.(orang)	180
Kegiatan Pemberian Alat Bantu bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar (orang)	600
Kegiatan Pemberian bantuan usaha ekonomis bagi orang dengan kecacatan	Jumlah Orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	180
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Lembaga Kesejahteraan Sosial swasta lainnya.	Jumlah Penghuni Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (org)	1500
Kegiatan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi warga binaan di panti sosial /LKS swasta	Jumlah penghuni panti /LKS swasta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1000
Kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana pelayanan sosial panti sosial/ LKS swasta	Jumlah panti sosial / LKS swasta yang memenuhi standar pelayanan panti (LKS)	25

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Akhir Periode (2021)
2	3	11
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eksnara pidana, PSK, dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyakit Sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (org)	1000
Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial /penutupan lokalisasi	Jumlah penghuni lokalisasi yang mendapatkan sosialisasi rencana penutupan (orang)	510
Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial		480
Program Pemberdayaan Perorangan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesos dan LKS yang memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan sosial (Org)	0
Kegiatan Peningkatan kualitas SDM manajer social kecamatan/ tenaga kesejahteraan social kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemaampuannya (orang)	210
Kegiatan peningkatan Kualias SDM Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	180
Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang ditingkatkan kualitas pelayanannya (LKS)	120
Kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan Karang Taruna	Jumlah Kelembagaan Karang Taruna yang ditingkatkan kualitasnya.	120
Kegiatan Pelestari nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan social	Jumlah generasi muda yang memiliki jiwa kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan social (orang).	600
Kegiatan Komda Lansia provinsi	Jumlah Komda laansia provinsi	1
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial (Org)	4850
Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS Korban Bencana.	Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1600
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping yang mampu mengendalikan pelaksanaan program PKH (orang)	179
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah.	Jumlah penyelenggaran pengumpulan sumbangan sosial dan undian yang mentaati ketentuan yang berlaku (lembaga)	60
Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Jumlah PMKS yang mendapatkan pemulihan trauma (orang)	150
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah	Prosesentase pemenuhan sarana/prasarana bagi pelaksanaan pelayanan sosial	75 %

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Akhir Periode (2021)
2	3	11
	dalam panti	
Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Bina Laras bagi orang dengan gangguan jiwa.	Jumlah gedung panti yang dibangun (unit)	10
Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Pengasuhan Anak	Jumlah gedung panti yang dibangun	9
Kegiatan Pembangunan Panti Sosial lanjut Lanjut Usia/jompo	Jumlah gedung panti yang dibangun (unit)	16
Kegiatan Peningkatan kualitas gedung dan sarana panti Sosial	Jumlah gedung dan sarana panti yang direhabilitasi	25
Kegiatan Pengadaan prasarana pelayanan Pantii Sosial	Jumlah prasarana pelayanan panti yang disediakan (Unit)	16

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Perusahaan Swasta Sosial

5.4 Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Sosial. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain.

Tabel 5.4.1. Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2015

Program	Tahun Pendanaan Indikatif (Rp 1000,-)
	2015
1. Program Pemberdayaan Sosial	2.769.250.000
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	4.250.100.000
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	894.500.000
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	660.000.000
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Modal Sosial	723.190.000
Total	9.297.040.000

Tabel 5.4.2. Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2016-2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Lokasi
1	2	3	6	8	10	12	14	16	18
1.	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Org)							Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan , Murung Raya,
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi fakir miskin	Jumlah fakir miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya (orang)	120.000	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan , Murung Raya,
	Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi fakir miskin	Jumlah Fakir miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	360.000	360.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan , Murung Raya,
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)							Palangka Raya
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Pantii Sosial Bina Remaja.	Jumlah Anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (orang)	1.451.100	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	Palangka Raya
	Kegiatan Pelayanan sosial lanjut usia di Pantii Sosial Tresna Werda.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan hak dasar secara inklusifitas (orang)	2.050.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	Palangjka Raya
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa di Pantii Sosial Bina Laras	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang terpenuhi kebutuhan hak dasarnya secara inklusifitas (orang).	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	Palangka Raya
	Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Wanita Rawan Sosial di Pantii Sosial Karya Wanita	Jumlah Tuna Sosial dan wanita rawan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	Palangka Raya

1	2	3	6	8	10	12	14	16	18
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya							Palangka Raya
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	100.000	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000	Palangka Raya
	Kegiatan Perlindungan Sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang berhadapan dengan hukum	50.000	50.000	60.000	60.000	75.000	80.000	Palangka Raya
4.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Orang Dengan Kecacatan dan trauma yang dapat yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)							14 kab/kota
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuannya.(orang)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	14 kab/kota
	Kegiatan Pemberian Alat Bantu bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar (orang)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	14 kab/kota
	Kegiatan Pemberian bantuan usaha ekonomis bagi orang dengan kecacatan	Jumlah Orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	14 kab/kota
5.	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Lembaga Kesejahteraan Sosial swasta lainnya.	Jumlah Penghuni Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (org)							Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,
	Kegiatan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi warga binaan di panti sosial /LKS swasta	Jumlah penghuni panti /LKS swasta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)		500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,
	Kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana pelayanan sosial panti sosial/ LKS swasta	Jumlah panti sosial / LKS swasta yang memenuhi standar pelayanan panti (LKS)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,
6.	Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnara pidana, PSK, dan penyakit sosiallainnya)	Jumlah Eks Penyakit Sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (org)							Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim,Katingan

1	2	3	6	8	10	12	14	16	18
	Kegiatan sosiaalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial /penutupan lokalisasi	Jumlah penghuni lokalisasi yang mendapatkan sosialisasi rencana penutupan (orang)	600.000	600.000	500.000	500.000	600.000	600.000	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim, Katingan
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim, Katingan
7.	Program Pemberdayaan Perorangan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesos dan LKS yang memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan sosial (Org)							Palangka Raya
	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM manajer social kecamatan/ tenaga kesejahteraan social kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemaampuan (orang)	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Palangka Raya
	Kegiatan peningkatan Kualias SDM Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Palangka Raya
	Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang ditingkatkan kualitas pelayanannya (LKS)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14 Kab/Kota
	Kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan Karang Taruna	Jumlah Kelembagaan Karang Taruna yang ditingkatkan kualitasnya.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14 Kab/Kota
	Kegiatan Pelestariannilai-nilaikepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan social	Jumlah generasi muda yang memiliki jiwa kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (orang).	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Palangka Raya
	Kegiatan Komda Lansia provinsi	Jumlah Komda laansia provinsi	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	Palangka Raya
8.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial (Org)							14 kab/kota
	Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS Korban Bencana.	Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	450.000	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	14 Kab/Kota

1	2	3	6	8	10	12	14	16	18
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping yang mampu mengendalikan pelaksanaan program PKH (orang)	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	14 Kab/kota
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah.	Jumlah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian yang mentaati ketentuan yang berlaku (lembaga)	165.000	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000	14 Kab/Kota
	Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Jumlah PMKS yang mendapatkan pemulihan trauma (orang)	350.000	400.000	450.000	450.000	450.000	500.000	Palangka Raya
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah	Prosesntase pemenuhan sarana/prasarana bagi pelaksanaan pelayanan sosial dalam panti							Palangka Raya, Barito Selatan, Kotawaringin Barat
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Bina Laras bagi orang dengan gangguan jiwa.	Jumlah gedung panti yang dibangun (unit)	2.000.000	2.000.000	.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Palangka Raya
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Pengasuhan Anak	Jumlah gedung panti yang dibangun	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Palangka Raya
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial lanjut Lanjut Usia/jompo	Jumlah gedung panti yang dibaangun (unit)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kotawaringin Barat dan Barito Selatan
	Kegiatan Peningkatan kualitas gedung dan sarana panti Sosial	Jumlah gedung dan sarana panti yang direhabilitasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Palangka Raya
	Kegiatan Pengadaan prasarana pelayanan Pantii Sosial	Jumlah prasarana pelayanan panti yang disediakan (Unit)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Palangka Raya, Barito Selatan dan Kobar
	Jumlah Total		17.201.100	18.525.000	20.045.000	20.815.000	21.810.000	22.625.000	

Bab 6

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Jumlah Fakir Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasar	470	120	200	250	250	250	250	1320
2.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	1078	1560	1580	1625	1630	1680	1780	9855
3.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial dan relawan sosial yang memberi pelayanan sosial.	385	105	105	105	105	105	105	630

Bab 7

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Proiritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Penyusunan Renstra merupakan rencana utama untuk melaksanakan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial terutama dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 2016 - 2021. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, disamping dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Palangka Raya, 31 Desember 2016

Kepala Dinas Sosial



Dr. GUNTUR TALAJAN, SH. M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19641119 198903 1 006

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

SKPD : Dinas Sosial

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi	Keterangan
				Realisasi Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13..1 5	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Org)	470	120	200	250	250	250	250	1320	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan , Murung Raya,	
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi fakir miskin	Jumlah fakir miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya (orang)	600	120	200	250	250	250	250	1320	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan , Murung Raya,	
	Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi fakir miskin	Jumlah Fakir miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	600	120	200	250	250	250	250	1320	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan , Murung Raya,	
	Kegiatan Pendampingan UEP bagi Fakir Miskin		234	78	20	25	25	25	25	198		
1.13..1 6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	879	260	270	300	300	300	300	1.690	Palangka Raya	
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja.	Jumlah Anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (orang)	779	120	120	120	120	120	120	720	Palangka Raya	
	Kegiatan Pelayanan sosial lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werda.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan hak dasar secara inklusifitas (orang)	100	100	100	100	100	100	100	600	Palangka Raya	
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa di Panti Sosial Bina Laras	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang terpenuhi kebutuhan hak dasarnya secara inklusifitas (orang).	10	10	20	30	50	50	50	210	Palangka Raya	
	Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Wanita Rawan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita	Jumlah Tuna Sosial dan wanita rawan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	100	30	30	50	50	50	50	160	Palangka Raya	
1.13.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	150	30	30	30	30	30	30	180	Palangka Raya	
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	30	30	30	30	30	30	30	180	Palangka Raya	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi	Keterangan
				Realisasi Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Perlindungan Sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang	100	20	20	20	20	20	20	120	Palangka Raya	
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Orang Dengan Kecacatan dan trauma yang dapat yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	450	160	160	160	160	160	160	960	14 kab/kota	
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuannya.(orang)	150	30	30	30	30	30	30	180	14 kab/kota	
	Kegiatan Pemberian Alat Bantu bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar (orang)	150	100	100	100	100	100	100	600	14 kab/kota	
	Kegiatan Pemberian bantuan usaha ekonomis bagi orang dengan kecacatan	Jumlah Orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	150	30	30	30	30	30	30	180	14 kab/kota	
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Lembaga Kesejahteraan Sosial swasta lainnya.	Jumlah Penghuni Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (org)	1250	250	250	250	250	250	250	1500	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,	
	Kegiatan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi warga binaan di panti sosial /LKS swasta	Jumlah penghuni panti /LKS swasta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1250		100	200	200	250	250	1000	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,	
	Kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana pelayanan sosial panti sosial/ LKS swasta	Jumlah panti sosial / LKS swasta yang memenuhi standar pelayanan panti (LKS)	0	0	5	5	5	5	5	25	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,	
1.13.20	Program pembinaan ekspepyandang penyakit sosial (eksnara pidana, PSK, dan penyakit sosiallainnya)	Jumlah Eks Penyakit Sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (org)	520	200	210	220	220	230	230	1000	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim,Katingan	
	Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial /penutupan lokalisasi	Jumlah penghuni lokalisasi yang mendapatkan sosialisasi rencana penutupan (orang)	120	120	100	100	100	50	50	510	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim,Katingan	
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial		80	80	80	80	80	80	80	480	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim,Katingan	
1.13.21	Program Pemberdayaan Perorangan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesos dan LKS yang memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan sosial (Org)	438	147	147	150	150	150	160	160	Palangka Raya	
	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM manajer social kecamatan/ tenaga kesejahteraan social kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemaampuan (orang)	35	35	35	35	35	35	35	35	Palangka Raya	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi	Keterangan
				Realisasi Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan peningkatan Kualias SDM Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	150	30	30	30	30	30	30	180	Palangka Raya	
	Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang ditingkatkan kualitas pelayanannya (LKS)	100	20	20	20	20	20	20	120	14 Kab/Kota	
	Kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan Karang Taruna	Jumlah Kelembagaan Karang Taruna yang ditingkatkan kualitasnya.	100	20	20	20	20	20	20	120	14 Kab/Kota	
	Kegiatan Pelestariannilai-nilaikepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan social	Jumlah generasi muda yang memiliki jiwa kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (orang).	500	100	100	100	100	100	100	600	Palangka Raya	
	Kegiatan Komda Lansia provinsi	Jumlah Komda laansia provinsi		1	1	1	1	1	1	1	Palangka Raya	
1.13.37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial (Org)	725	739	800	800	800	800	850	4850	14 kab/kota	
	Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS Korban Bencana.	Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1200	100	300	300	300	300	300	1600	14 Kab/Kota	
	Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana	1800	600	600	600	900	900	1200	4800	14 Kab/Kota	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping yang mampu mengendalikan pelaksanaan program PKH (orang)	165	165	179	179	179	179	179	179	14 Kab/kota	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah.	Jumlah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian yang mentaati ketentuan yang berlaku (lembaga)	50	10	10	10	10	10	10	60	14 Kab/Kota	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Jumlah PMKS yang mendapatkan pemulihan trauma (orang)	125	15	25	25	25	25	25	150	Palangka Raya	
1.13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah	Prosesntase pemenuhan sarana/prasarana bagi pelaksanaan pelayanan sosial dalam panti	50%	70 %	72 %	74 %	75 %	75 %	75 %	75 %	Palangka Raya, Barito Selatan, Kotawaringin Barat	
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Bina Laras bagi orang dengan gangguan jiwa.	Jumlah gedung panti yang dibangun (unit)	0	0	3	3	3	1		10	Palangka Raya	
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Pengasuhan Anak	Jumlah gedung panti yang dibangun	0	0			3	3	1	9	Palangka Raya	
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial lanjut Lanjut Usia/jompo	Jumlah gedung panti yang dibaangun (unit)	1	0	0	4	4	4	4	16	Kotawaringin Barat dan Barito Selatan	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi	Keterangan
				Realisasi Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Peningkatan kualitas gedung dan sarana panti Sosial	Jumlah gedung dan sarana panti yang direhabilitasi	58	3	5	5	5	5	5	25	Palangka Raya	
	Kegiatan Pengadaan prasarana pelayanan Pantii Sosial	Jumlah prasarana pelayanan panti yang disediakan (Unit)	1	1	3	3	3	3	3	16	Palangka Raya, Barito Selatan dan Kobar	

Sumber : RKPd 2016

RENCANA CAPAIAN KINERJA PERIODE 2016 - 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi
				Realisasi Target	Rencana Biaya												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.13..15	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Org)	470	120	-	200	-	250	-	250	-	250	-	250	-	1320	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan, Murung Raya.
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi fakir miskin	Jumlah fakir miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya (orang)	600	120	120,000	200	120,000	250	250,000	250	250,000	250	250,000	250	250,000	1320	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan, Murung Raya.
	Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) bagi fakir miskin	Jumlah Fakir miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	600	120	360,000	200	360,000	250	750,000	250	750,000	250	750,000	250	750,000	1320	Kotim, Lamandau, Katingan, Seruyan, Murung Raya.
1.13..16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	879	260	-	270	-	300	-	300	-	300	-	300	-	1,690	Palangka Raya
	KIE konseling dan kampanye sosial	Jumlah lokasi penyuluhan dan kampanye	16	2	100,000	3	150,000	4	200,000	4	200,000	4	200,000	4	200,000	21	
	Kegiatan Bimbingan sosial dan ketrampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Panti Sosial Bina Remaja.	Jumlah Anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (orang)	779	120	1,451,100	120	1,600,000	120	1,800,000	120	2,000,000	120	2,200,000	120	2,400,000	720	Palangka Raya
	Kegiatan Pelayanan sosial lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werda.	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan hak dasar secara inklusifitas (orang)	100	100	2,050,000	100	2,100,000	100	2,200,000	100	2,300,000	100	2,400,000	100	2,500,000	600	Palangjka Raya

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi
				Realisasi Target	Rencana Biaya												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa di Panti Sosial Bina Laras	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang terpenuhi kebutuhan hak dasarnya secara inklusifitas (orang).	10	10	1,000,000	20	1,200,000	30	1,400,000	50	1,600,000	50	1,800,000	50	2,000,000	210	Palangka Raya
	Kegiatan Pelayanan sosial lanjut usia berbasis keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan hak dasar dim keluarga (orang)	259	100	200,000	120	240,000	120	240,000	150	300,000	150	300,000	200	400,000	840	se klteng
	Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Wanita Rawan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita	Jumlah Tuna Sosial dan wanita rawan sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	100	30	1,000,000	30	1,200,000	50	1,400,000	50	1,600,000	50	1,800,000	50	2,000,000	160	Palangka Raya
1.13.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	150	30		30		30		30		30		30		180	Palangka Raya
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya	30	30	100,000	30	120,000	30	150,000	30	160,000	30	170,000	30	180,000	180	Palangka Raya
	Kegiatan Perlindungan Sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang berhadapan dengan hukum	100	20	50,000	20	50,000	20	60,000	20	60,000	20	75,000	20	80,000	120	Palangka Raya
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Orang Dengan Kecacatan dan trauma yang dapat yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasar (org)	450	160	-	160	-	160	-	160	-	160	-	160	-	960	14 kab/kota
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuannya.(orang)	150	30	60,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000	180	14 kab/kota
	Kegiatan Pemberian Alat Bantu bagi orang dengan kecacatan	Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar (orang)	150	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	600	14 kab/kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi
				Realisasi Target	Rencana Biaya												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kegiatan Pemberian bantuan usaha ekonomis bagi orang dengan kecacatan	Jumlah Orang dengan kecacatan yang dapat meningkatkan kemampuan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya (orang)	150	30	90,000	30	90,000	30	90,000	30	90,000	30	90,000	30	90,000	180	14 kab/kota
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo/Lembaga Kesejahteraan Sosial swasta lainnya.	Jumlah Penghuni Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (org)	1250	250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	1500	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,
	Kegiatan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi warga binaan di panti sosial /LKS swasta	Jumlah penghuni panti /LKS swasta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1250			100	250,000	200	600,000	200	600,000	250	750,000	250	750,000	1000	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,
	Kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana pelayanan sosial panti sosial/ LKS swasta	Jumlah panti sosial/ LKS swasta yang memenuhi standar pelayanan panti (LKS)	0	0	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	25	Palangka Raya, Kotim, Kapuas, Kobar, Barsel, Barut,
1.13..20	Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, dan penyakit sosiallainnya)	Jumlah Eks Penyakit Sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (org)	520	200	-	210	-	220	-	220	-	230	-	230	-	1000	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim,Katingan
	Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial /penutupan lokalisasi	Jumlah penghuni lokalisasi yang mendapatkan sosialisasi rencana penutupan (orang)	120	120	600,000	100	600,000	100	500,000	100	500,000	120	600,000	120	600,000	510	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim,Katingan
	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial		80	80	160,000	80	160,000	80	160,000	80	160,000	80	160,000	80	160,000	480	Palangka Raya, Kotim, Barut, Bartim,Katingan
1.13.21	Program Pemberdayaan Perorangan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesos dan LKS yang memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan sosial (Org)	438	147	-	147	-	150	-	150	-	150	-	160	-	160	Palangka Raya
	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM manajer social kecamatan/ tenaga kesejahteraan social kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemaampuan (orang)	-35	35	105,000	35	105,000	35	105,000	35	105,000	35	105,000	35	105,000	210	Palangka Raya

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi
				Realisasi Target	Rencana Biaya												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kegiatan peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	150	30	60,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000	180	Palangka Raya
	Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang ditingkatkan kualitas pelayanannya (LKS)	100	20	40,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	120	14 Kab/Kota
	Kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan Karang Taruna	Jumlah Kelembagaan Karang Taruna yang ditingkatkan kualitasnya.	100	20	40,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	120	14 Kab/Kota
	Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah generasi muda yang memiliki jiwa kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (orang).	500	100	850,000	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	900,000	600	Palangka Raya
	Kegiatan Komda Lansia provinsi	Jumlah Komda lansia provinsi		1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	160,000	1	160,000	1	Palangka Raya
1.13. 37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial (Org)	725	739	-	800	-	800	-	800	-	800	-	850	-	4850	14 kab/kota
	Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS Korban Bencana.	Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	1200	100	450,000	300	500,000	300	500,000	300	500,000	300	600,000	300	600,000	1600	14 Kab/Kota
	Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bencana	1800	600		600	600,000	600	600,000	900	900,000	900	900,000	1200	120,000	4800	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping yang mampu mengendalikan pelaksanaan program PKH (orang)	165	165	250,000	179	300,000	179	350,000	179	400,000	179	450,000	179	500,000	179	14 Kab/kota
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah.	Jumlah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian yang mentaati ketentuan yang berlaku (lembaga)	50	10	165,000	10	170,000	10	180,000	10	190,000	10	200,000	10	200,000	60	14 Kab/Kota
	Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Jumlah PMKS yang mendapatkan pemulihan trauma (orang)	125	15	350,000	25	400,000	25	450,000	25	450,000	25	450,000	25	500,000	150	Palangka Raya

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	IndikatorKinerja (Outcome)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Lokasi	
				Realisasi Target	Rencana Biaya													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah	Prosesntase pemenuhan sarana/prasarana bagi pelaksanaan pelayanan sosial dalam panti	50%	70%	-	72%	-	74%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%		Palangka Raya, Barito Selatan, Kotawaringin Barat
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Bina Laras bagi orang dengan gangguan jiwa.	Jumlah gedung panti yang dibangun (unit)	0	0	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	1	2,000,000		2,000,000	10	Palangka Raya	
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial Pengasuhan Anak	Jumlah gedung panti yang dibangun	0	0	1,500,000		1,500,000		1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	1	1,500,000	9	Palangka Raya	
	Kegiatan Pembangunan Panti Sosial lanjut Lanjut Usia/Jompo	Jumlah gedung panti yang dibaangun (unit)	1	0	1,500,000	0	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	16	Kotawaringin Barat dan Barito Selatan	
	Kegiatan Peningkatan kualitas gedung dan sarana panti Sosial	Jumlah gedung dan sarana panti yang direhabilitasi	58	3	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	5	1,000,000	25	Palangka Raya	
	Kegiatan Pengadaan prasarana pelayanan Pantii Sosial	Jumlah prasarana pelayanan panti yang disediakan (Unit)	1	1	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000	16	Palangka Raya, Barito Selatan dan Kobar	
	Jumlah Total				17,501,100		19,265,000		20,935,000		22,065,000		23,210,000		23,345,000			

LAPORAN PENCAPAIAN HASIL KINERJA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016
BULAN : AGUSTUS 2016

0.00

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	T A R G E T				R E A L I S A S I K E U A N A G N								REALISASI	
				LOKASI	RENCANA TK. CAPAIAN	SATUAN	PLAFON ANGGARAN	SID BULAN LALU		BULAN INI		SID BULAN INI		FISIK (%)	S A L D O		
								(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1.13.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					975,849,925	52.26	132,742,065	7.11	1,108,591,990	59.37	58.12	758,620,010		
1	1.13.01.01.01.5.2	01.01	Perediaan jasa surat menyurat	Terselnya Sasaran Surat Menyurat dan Inforomasinya Program Pembangunan Kesej. Sosial.	Palangka Raya	1000	Benda Pos	13,750,000	4,793,000	34.86	0	-	4,793,000	34.86	50.00	8,957,000	65.14
2	1.13.01.01.02.5.2	01.02	Perediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dengan tersedianya Jasa komunikasi Pelaksanaan tugas semakin lancar.	Kota Palangka Raya	5	gedung	340,000,000	215,940,902	63.51	26,671,965	7.84	242,612,867	71.36	70.00	97,387,133	28.64
3	1.13.01.01.05.5.2	01.05	Perediaan jasa jaminan barang milik daerah	Keselamatan gedung kantor Dinas Sosial, Mess, PSBRKW, PSTW tejamin.	Kota Palangka Raya	6	Gedung	10,450,000	9,871,448	94.46	0	-	9,871,448	94.46	100	578,552	5.54
4	1.13.01.01.07.5.2	01.07	Perediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya administrasi Keuangan dan Aset	Kota Palangka Raya	23	orang	603,830,000	326,370,500	54.05	48,657,500	8.06	375,028,000	62.11	60.00	228,802,000	37.89
5	1.13.01.01.08.5.2	01.08	Perediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor meningkat , sehat bersih dan nyaman	Kota Palangka Raya	4	gedung	50,196,000	27,190,900	54.17	4,007,300	7.98	31,198,200	62.15	60.00	18,997,800	37.85
6	1.13.01.01.10.5.2	01.10	Perediaan alat tulis kantor	Terwujudnya kelancaran administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran Dinas Sosial	Kota Palangka Raya	1	Tahun	99,000,000	49,203,125	49.70	18,002,100	18.18	67,205,225	67.88	60.00	31,794,775	32.12
7	1.13.01.01.11.5.2	01.11	Perediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran Dinas Sosial	Kota Palangka Raya	33105	Eksemplar	73,523,500	38,579,000	52.47	4,680,000	6.37	43,259,000	58.84	60.00	30,264,500	41.16
8	1.13.01.01.12.5.2	01.12	Perediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi Listrik yang aman.	Palangka Raya	4	gedung	80,000,000	34,681,300	43.35	4,525,700	5.66	39,207,000	49.01	60.00	40,793,000	50.99
9	1.13.01.01.14.5.2	01.14	Perediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhiya Peralatan Rumah tangga Kantor Dinas dan UPT	Palangka Raya	57	unit	195,000,000	0	-	0	-	-	-	195,000,000	100.00	
10	1.13.01.01.15.5.2	01.15	Perediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor Dinas dan UPT	Palangka Raya	500	eksemplar	47,300,000	8,690,000	18.37	1,615,000	3.41	10,305,000	21.79	60.00	36,995,000	78.21
11	1.13.01.01.17.5.2	01.17	Perediaan makanan dan minuman	Terpenuhiya makan dan minum pada rapat-rapat koordinasi	Palangka Raya	48	kali	21,962,500	8,400,000	38.25	4,112,500	18.73	12,512,500	56.97	60.00	9,450,000	43.03
12	1.13.01.01.18.5.2	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Adanya persamaan persepsi dalam rangka penangan PMKS dan terkoordinir	Luar Daerah	15	kali	160,000,000	117,699,750	73.56	20,470,000	12.78	138,169,750	86.36	80.00	21,830,250	13.64
13	1.13.01.01.19.5.2	01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Adanya persamaan persepsi dalam rangka penangan PMKS	14 Kabupaten/K	30	kali	159,000,000	134,430,000	84.55	0	-	134,430,000	84.55	85.00	24,570,000	15.45
14	1.13.01.01.35.5.2	01.35	Rujukan berobat PNS	PNS mendapat kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik	Palangka Raya	2	org	13,200,000	0	-	0	-	-	-	13,200,000	100.00	

II		1.13.01.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3,258,239,250	1,615,699,034	49.59	504,769,039	15.49	2,120,468,073	65.08	73.02	1,137,771,177	
15	1.13.01.02.07.5.2	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terperluhny Perlengkapan Gedung Kantor dalam proses pelayanan kepada Masyarakat.	Palangka Raya	40	unit	121,000,000	114,627,000	94.73	0	-	114,627,000	94.73	100.00	6,373,000	5.27
16	1.13.01.02.09.5.2	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terperluhny Perlengkapan Gedung Kantor dalam proses pelayanan kepada Masyarakat.	Palangka Raya	11	unit	111,164,250	0	-	0	-	-	-		111,164,250	100.00
17	1.13.01.02.22.5.2	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terperluhny pemeliharaan Gedung demi keluhlan Bangunan Gedung	Palangka Raya	4	Gedung	78,905,000	28,747,500	36.43	18,622,000	23.60	47,369,500	60.03	60.00	31,535,500	39.97
18	1.13.01.02.24.5.2	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terperluhny Kend. Operasional R4 dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan.	Palangka Raya	9	unit	149,670,000	45,277,334	30.25	37,407,239	24.99	82,684,573	55.24	60.00	66,985,427	44.76
19	1.13.01.02.28.5.2	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terperluhny pemeliharaan peralatan Gedung Kantor dim menunjang tugas perkarbon.	Palangka Raya	7	unit	47,500,000	12,610,000	26.55	3,690,000	7.77	16,300,000	34.32	65.00	31,200,000	65.68
20	1.13.01.02.42.5.2	02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terperluhny kenyamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas	Palangka Raya	5	Unit	2,750,000,000	1,414,437,200	51.43	445,049,800	16.18	1,859,487,000	67.62	76.00	890,513,000	32.38
III		1.13.01.03	03	Program peningkatan disiplin aparatur				165,000,000	108,489,000	65.75	0	-	108,489,000	65.75	85.00	56,511,000	
21	1.13.01.03.02.5.2	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	127 Org PNS mendapat pakaian dinas.	Palangka Raya	161	Org	165,000,000	108,489,000	65.75	0	-	108,489,000	65.75	85.00	56,511,000	34.25
IV		1.13.01.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				791,567,000	422,745,900	53.41	39,952,700	5.05	462,698,600	58.45	61.16	328,868,400	
22	1.13.01.05.01.5.2	05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis bagi PNS	Palangka Raya	40	Orang	61,050,000	11,098,200	18.18	0	-	11,098,200	18.18	60.00	49,951,800	81.82
23	1.13.01.05.36.5.2	05.36	Rapat koordinasi perencanaan	Tersinkronisasinya Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Palangka Raya	4	laporan	226,440,000	164,746,900	72.76	39,952,700	17.64	204,699,600	90.40	75.00	21,740,400	9.60
24	1.13.01.05.73.5.2	05.73	Sosialisasi program PMZL	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang program Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Program PMZL	14 Kabupaten/Kota	2	laporan	404,077,000	235,938,800	58.39	0	-	235,938,800	58.39	65.00	168,138,200	41.61
25	1.13.01.05.74.5.2	05.74	Pengembangan sumber daya aparatur kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman Aparatur Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kota Palangka Raya	2	laporan	100,000,000	10,962,000	10.96	0	-	10,962,000	10.96	15.00	89,038,000	89.04
V		1.13.01.06	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				20,000,000	9,156,850	45.78	0	-	9,156,850	45.78	60.00	10,843,150	
26	1.13.01.06.01.5.2	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan hitung realisasi kinerja SKPD	Terselesainya pelaporan secara tepat waktu.	Palangka Raya	7	Laporan	10,000,000	4,788,950	47.89	-	-	4,788,950	47.89	60.00	5,211,050	52.11
27	1.13.01.06.41.5.2	06.41	Penyusunan RPKD/reja dan laporan kinerja SKPD	Terselesainya pelaporan secara tepat waktu.	Palangka Raya	7	Laporan	10,000,000	4,367,900	43.68	-	-	4,367,900	43.68	60.00	5,632,100	56.32

XI	1.13.01.19	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				2,050,500,000	791,330,480	38.59	40,560,000	1.98	831,890,480	40.57	68.00	1,218,609,520		
40	1.13.01.19.07.5.2	19.07	Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo	Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia di PSTW	Kota Palangka	100	OT	2,050,500,000	791,330,480	38.59	40,560,000	1.98	831,890,480	40.57	68.00	1,218,609,520	59.43
XII	1.13.01.20	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				710,000,000	185,078,450	26	15,189,700	2	200,268,150	28.21	29.30	509,731,850		
41	1.13.01.20.04.5.2	20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial	Pulang Pisau Kotim dan Katingan	120	Org	110,000,000	82,844,000	75.31	0	-	82,844,000	75.31	80.00	27,156,000	24.69
42	1.13.01.20.07.5.2	20.07	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial	Marung Raya, Barut	80	Org	600,000,000	102,234,450	17.04	15,189,700	2.53	117,424,150	19.57	20.00	482,575,850	80.43
XIII	1.13.01.21	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				3,612,300,000	265,646,000	7.35	186,513,100	5.16	452,159,100	12.52	8.77	3,160,140,900		
43	1.13.01.21.01.5.2	21.01	Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	14 Kab./ Kota	35	Org	150,000,000	44,836,000	29.89	0	-	44,836,000	29.89	35.00	105,164,000	70.11
44	1.13.01.21.02.5.2	21.02	Pemberdayaan organisasi sosial	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Organisasi Sosial	Palangka Raya	60	Org	42,900,000	27,941,000	65.13	0	-	27,941,000	65.13	67.00	14,959,000	34.87
45	1.13.01.21.03.5.2	21.03	Pemberdayaan Karang Taruna	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Karang Taruna	Palangka Raya	50	Orang	100,000,000	17,639,000	17.64	19,960,000	19.96	37,999,000	37.60	20.00	62,401,000	62.40
46	1.13.01.21.05.5.2	21.05	Pelestarian nilai-nilai kepeahlawanan, keperifisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Terlaksananya Penanam nilai kepeahlawanan dan keperifisan kepada generasi muda	Palangka Raya	1	Dokumen	854,400,000	132,290,000	15.48	154,743,500	18.11	287,033,500	33.59	20.00	567,366,500	66.41
47	1.13.01.21.06.5.2	21.06	fasilitas KOMDA lansia	Terlaksananya aktifitas KOMDA Lansia	Palangka Raya	1	laporan	165,000,000	42,940,000	26.02	11,809,600	7.16	54,749,600	33.18	27.00	110,250,400	66.82
48	1.13.01.21.08.5.2	21.08	Dukungan HKSNI Tingkat Nasional	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Kesetiaawanan Sosial Tingkat Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1	laporan	2,300,000,000	0	-	0	-	-	-	2,300,000,000	100.00	
XIV	1.13.01.37	37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				2,055,000,000	822,413,100	40.02	38,789,700	1.89	861,202,800	41.91	51.93	1,193,797,200	58.09	
49	1.13.01.37.01.5.2	37.01	Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi PMKS	14 Kab./ Kota	100	orang	460,000,000	114,381,000	24.87	9,830,000	2.14	124,211,000	27.00	38.00	335,789,000	73.00
50	1.13.01.37.02.5.2	37.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin	13 Kab./ Kota Minus Kab. Sukamara	13	Laporan	250,000,000	29,198,500	11.68	0	-	29,198,500	11.68	30.00	220,801,500	88.32
51	1.13.01.37.03.5.2	37.03	Kegiatan Pengumpulan dan Pengalokasian sumber dana Sosial	Terlaksananya pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan undian gratis berhadiah	Palangka Raya	1	Laporan	165,000,000	20,960,000	12.70	6,889,700	4.18	27,849,700	16.88	20.00	137,150,300	83.12
52	1.13.01.37.04.5.2	37.04	Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Terlaksananya perlindungan bagi PMKS di trauma center	Palangka Raya	25	orang	350,000,000	106,554,700	30.44	5,690,000	1.63	112,244,700	32.07	32.00	237,755,300	67.93
53	1.13.01.37.05.5.2	37.05	Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Terlaksananya Bmtek Bagi TAGANA, Tokoh Masyarakat dan Pengerahan Massa untuk Penanganan Bencana	Kab. Lamandau, Pulpis, Kotim, Kab. Sukamara dan Barim	600	orang	830,000,000	551,318,900	66.42	16,380,000	1.97	567,698,900	68.40	81.00	262,301,100	31.60
JUMLAH							19,790,000,000	7,010,319,914	35.42	1,110,268,880	5.61	8,120,588,794	41.03	47.44	11,669,411,206	58.97	

Palangka Raya, 31 Agustus 2016
Kepala Dinas Sosial

Dr. GUNTUR TALAJAN, SH. M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19641119 198903 1 006

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATOR DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun											
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
							Tar-get	Rupiah	Tar-get	Rupiah	Tar-get	Rupiah	Tar-get	Rupiah	Tar-get	Rupiah	Tar-get	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								815,000		1,020,000		1,225,000		1,225,000		1,225,000		1,225,000
1.	Berkontribusi dalam Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan bagi PMKS	Meningkatkan Pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang mampu memenuhi kebutuhan dasar	150	300,000	200	400,000	250	500,000	250	500,000	250	500,000	250	500,000
						Jumlah pendamping sosial	15	15,000	20	20,000	25	25,000	25	25,000	25	25,000	25	25,000
2.	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS	Meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan bagi PMKS	Meningkatkan Pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah WRSE yang mampu memenuhi kebutuhan dasar	150	300,000	200	400,000	250	500,000	250	500,000	250	500,000	250	500,000
					Pemberdayaan Keluarga Rentan	Jumlah keluarga rentan yang terpenuhi hak dasarnya.	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000
								7,125,000		8,110,000		8,725,000		9,485,000		10,105,000		10,525,000
			Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar dan WRSE pada PSBRKW	Jumlah Anak Bermasalah Sosial yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	120	1,500,000	120	1,600,000	120	1,700,000	120	1,800,000	120	1,900,000	120	2,000,000
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	100	2,200,000	100	2,300,000	100	2,400,000	120	2,500,000	120	2,600,000	120	2,700,000
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	20	400,000	20	500,000	20	500,000	30	750,000	30	750,000	30	750,000
						Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	25	400,000	25	500,000	30	600,000	30	600,000	30	600,000	30	600,000
						Jumlah Tuna Sosial yang mendapat rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	20	400,000	20	500,000	20	500,000	30	600,000	40	800,000	40	800,000
						Jumlah Eks psikotik yang mendapat rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	20	400,000	20	500,000	20	500,000	30	600,000	30	600,000	30	600,000
			Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		Jumlah orang terlantar dan pekerja migran yang kembali ke daerah asal	100	55,000	100	50,000	100	50,000	120	60,000	150	75,000	150	75,000
						Jumlah RTS PKH yang mendapat pendampingan	13	250,000	13	300,000	14	400,000	14	500,000	14	500,000	14	600,000
						Jumlah pejabat yang memahami aturan PUB dan UGB	5	160,000	5	160,000	6	175,000	6	175,000	7	180,000	8	200,000
						Jumlah masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam penanggulangan bencana	600	600,000	600	600,000	800	800,000	800	800,000	1,000	1,000,000	1,000	1,000,000
						Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya	100	460,000	120	500,000	120	500,000	120	500,000	120	500,000	130	600,000
						Jumlah korban bencana yang menjalani pemulihan psikososial	100	300,000	120	600,000	120	600,000	120	600,000	120	600,000	120	600,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								602,000		688,000		958,000		958,000		1,270,000		1,270,000
3.	Meningkatkan partisipasi Potensi dan	Meningkatnya peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bimbingan dan Pelatihan Manajemen bagi Pengurus LKS Penguatan Kapasitas Organisasi			Jumlah Organisasi Sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesos	6	42,000	8	48,000	8	48,000	8	48,000	10	60,000	10	60,000
			Peningkatan kapasitas SDM relawan sosial			Jumlah Dunia Usaha yang melaksanakan CSR	1	50,000	1	50,000	2	100,000	2	100,000	4	200,000	4	200,000
						Jumlah KT yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesos	6	75,000	6	100,000	8	125,000	8	125,000	8	150,000	8	150,000
		Meningkatnya peran masyarakat sebagai relawan sosial	Peningkatan peran dunia usaha dalam CSR			Jumlah WKSMB yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesos	2	75,000	2	100,000	4	200,000	4	200,000	6	300,000	6	300,000
						Jumlah PSM yang mendampingi pelayanan kesos	20	60,000	20	40,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000	30	60,000
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesos	131	100,000	131	150,000	131	175,000	131	175,000	131	200,000	131	200,000
						Jumlah Tagana yang menyelenggarakan evakuasi dan pemulihan psikososial bagi korban bencana	100	200,000	100	200,000	120	250,000	120	250,000	130	300,000	130	300,000
								1,050,000		1,090,000		1,090,000		1,200,000		1,200,000		1,300,000
4.	Meningkatkan pemanfaatan modal sosial.	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan			Jumlah Masyarakat yang memahami dan memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	800	850,000	800	850,000	800	850,000	900	900,000	900	900,000	1,000	1,000,000
			Penyuluhan Sosial			Jumlah Masyarakat yang memahami dan memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial	100	200,000	120	240,000	120	240,000	150	300,000	150	300,000	150	300,000
5.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bln	1,659,700		1,742,685		1,829,819		1,921,310		2,017,376		2,118,245
6.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bln	2,809,844		2,950,336		3,097,853		3,252,746		3,415,383		3,586,152
7.	Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			Program peningkatan disiplin aparatur		12 bln	108,650		114,083		119,787		125,776		132,065		138,668
8.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 bln	596,633		626,465		657,788		690,677		725,211		761,472
9.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		12 bln	20,000		21,000		22,000		23,000		24,000		25,000
	JUMLAH							14,786,827		16,362,568		17,725,247		18,881,509		20,114,035		20,949,536